

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

(LAMPIRAN II.01; PP 71 TAHUN 2010)

BANDI

Bandi.staff.fe.uns.ac.id

PENDAHULUAN

Paragraph 1-paragraph 5

TUJUAN-PP 71/2010

LO-1

Tujuan kerangka konseptual sebagai acuan bagi:

- Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik (KSAP) dlm pelaksanaan tugasnya
- Penyusun laporan keuangan.
- Auditor (BPK)
- Para pemakai laporan keuangan sektor publik.

PP 71/2010 LAMPIRAN II.01 KK

FUNGSI - PP 71/2010

LO-1

Fungsi kerangka konseptual sebagai acuan dalam:

- terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka
 - ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini.
- Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan

• PP 71/2010 LAMPIRAN II.01 KK

Ruang Lingkup Kerangka Konseptual

LO-1

1. Tujuan kerangka konseptual
2. Lingkungan akuntansi pemerintah
3. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna
4. Entitas pelaporan;
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum
6. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
7. definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Paragraph 6-paragraph 15

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

LO-3

- Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya
- Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 - b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan perlu^{LO-3} dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 - 1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan
 - 2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah
 - 3) adanya pengaruh proses politik
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
 - b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan perlu^{LO-3} dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan
 - a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan
 - b. Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
 - 1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan alat pengendalian
 - 2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan
 - 3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian

Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan

- Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat.
 - Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan.
 - Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 - Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara pemerintahan.

Bentuk Umum Pemerintahan dan Pemisahan Kekuasaan

- Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintahan,
 - pihak eksekutif menyusun anggaran dan
 - menyampaikannya kepada pihak legislatif
 - untuk mendapatkan persetujuan.
 - Setelah mendapat persetujuan, pihak eksekutif melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut.
 - Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi dan Transfer Pendapatan antar Pemerintah

- Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan RI, yaitu
 1. pemerintah pusat,
 2. pemerintah propinsi, dan
 3. pemerintah kabupaten/kota.
- Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
- Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem
 - bagi hasil,
 - alokasi dana umum,
 - hibah, atau
 - subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Politik

- Salah satu tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
 - pemerintah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya
 - guna memenuhi keinginan masyarakat.
- Satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah
 - berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah

- Dalam keadaan tertentu pemerintah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan,
 - pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak.

Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah

Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain:

- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
- (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

- Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal
 - hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif
 - tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.
- Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.
 - tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari setahun

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

- Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:
 - (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
 - (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

- Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti:
 - gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi.
- Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai.
 - Fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial.
 - Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

Kemungkinan Penggunaan Akuntansi Dana untuk Tujuan Pengendalian

- Akuntansi dana (*fund accounting*)
 - merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya,
 - sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima.
- Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*)
 - sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Paragraph 16-paragraph 18

Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna Laporan Keuangan

- Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:
 - (a) masyarakat;
 - (b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - (d) pemerintah.

KEBUTUHAN INFORMASI

Kebutuhan Informasi

- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.
 - laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
 - berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
- Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.
- Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

ENTITAS PELAPORAN

Paragraph 19-paragraph 20

ENTITAS PELAPORAN

- Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
 - yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
 - berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:
 - (a) Pemerintah pusat;
 - (b) Pemerintah daerah;
 - (c) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

ENTITAS PELAPORAN

- Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
 - pengelolaan,
 - pengendalian, dan
 - penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu,
 - dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Paragraph 21-paragraph 24

Peranan Pelaporan Keuangan

- Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
- Laporan keuangan terutama digunakan untuk
 - membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan,
 - menilai kondisi keuangan,
 - mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan
 - membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Peranan Pelaporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban

- untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan
- secara sistematis dan terstruktur
- pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - (a) Akuntabilitas
 - (b) Manajemen
 - (c) Transparansi
 - (d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Peranan Pelaporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkanuntuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

- Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
- yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
- dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

- Membantu para pengguna
- untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan
- sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
- untuk kepentingan masyarakat.

Peranan Pelaporan Keuangan

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkanuntuk kepentingan:

(c) Transparansi

- Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
- kepada masyarakat
- berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
- atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

- Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan
- apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

- menilai akuntabilitas dan
- membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - (a) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - (b) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - (c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam

- menilai akuntabilitas dan
- membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - (d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - (e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - (f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

- Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai
 - pendapatan,
 - belanja,
 - transfer,
 - dana cadangan,
 - pembiayaan,
 - aset,
 - kewajiban,
 - ekuitas dana, dan
 - arus kas suatu entitas pelaporan.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Paragraph 25-paragraph 26

Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Arus Kas;
- (d) Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan

- Selain laporan keuangan pokok (seperti disebut pada paragraf 25), entitas pelaporan diperkenankan menyajikan
 - Laporan Kinerja Keuangan dan
 - Laporan Perubahan Ekuitas.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Paragraph 27

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah:

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- (b) Undang-undang di bidang keuangan negara;
- (c) Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- (d) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
- (e) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- (f) Ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
- (g) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

ASUMSI DASAR

Paragraph 28-Paragraph 31

Asumsi Dasar (28)

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah

- anggapan yang diterima
- sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan
- agar standar akuntansi dapat diterapkan, terdiri dari:
 - (a) Asumsi kemandirian entitas;
 - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Kemandirian Entitas (29)

- Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi,
 - berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan
 - sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.
- Indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
 - adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh.

Kemandirian Entitas (29)

- Entitas bertanggung jawab atas
 - pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca
 - untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya,
 - termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta
 - terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas (30)

- Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya.
- Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*) ⁽³¹⁾

- Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.
- Agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Paragraph 32-Paragraph 37

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN (32)

- Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah
 - ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi
 - sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
 - (a) Relevan;
 - (b) Andal;
 - (c) Dapat dibandingkan; dan
 - (d) Dapat dipahami.

Relevan (33)

- Laporan keuangan dikatakan relevan
 - apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna
 - dengan membantu mereka
 - mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan
 - memprediksi masa depan,
 - serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Relevan (34)

Informasi yang relevan :

- (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
 - memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau
 - mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
 - dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang
 - berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

Relevan (34)

Informasi yang relevan :

(c) Tepat waktu

- disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

(d) Lengkap

- Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin,
- yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan
 - diungkapkan dengan jelas
 - agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal (35)

- Informasi dalam laporan keuangan
 - bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material,
 - menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- Informasi mungkin relevan,
 - tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan
 - maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

Andal (35)

- Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - (a) Penyajian Jujur
 - Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya
 - yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - (b) Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
 - Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan
 - apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - (c) Netralitas
 - Informasi diarahkan pada kebutuhan umum
 - dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan (36)

- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna
 - jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
 - laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.
 - Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.
 - Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.
- Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan,
 - perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami⁽³⁷⁾

- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami
 - oleh pengguna dan
 - dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
- Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
 - atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta
 - adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Paragraph 38-Paragraph 52

Prinsip Akuntansi (38)

- Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
 - sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati
 - oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi,
 - oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta
 - oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Prinsip Akuntansi (38)

- Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
 - (a) Basis akuntansi;
 - (b) Prinsip nilai historis;
 - (c) Prinsip realisasi;
 - (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - (e) Prinsip periodisitas;
 - (f) Prinsip konsistensi;
 - (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - (h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi (39)

- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah
 - basis kas untuk pengakuan
 - pendapatan,
 - belanja, dan
 - pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran
 - basis akrual untuk pengakuan
 - aset,
 - kewajiban, dan
 - ekuitas dalam Neraca.

Basis Akuntansi (40)

- Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa
 - pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan
 - belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.
- Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba.
- Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa
 - disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis Akuntansi (41)

- Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana
 - diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau
 - pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah,
 - tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

Basis Akuntansi (42)

- Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan (pada paragraf 26)
 - menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual,
 - baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
 - penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Nilai Historis (*Historical Cost*) (43-44)

- Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*)
 - untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
- Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan
 - untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain
 - karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi.
- Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (*Realization*) (45-46)

- Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal
 - akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.
- Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah
 - tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*) (47)

- Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar
 - transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan,
 - perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan
 - bukan hanya aspek formalitasnya.
- Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya,
 - maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas
 - dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (*Periodicity*) (48)

- Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi
 - menjadi periode-periode pelaporan
 - sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- Periode utama yang digunakan adalah tahunan.
 - periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Konsistensi (*Consistency*) (49)

- Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa
 - dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal).
 - tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat
 - bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.
 - Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*) (50)

- Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
 - Yang dapat ditempatkan pada
 - lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*) (51)

- Laporan keuangan menyajikan dengan wajar
 - Laporan Realisasi Anggaran,
 - Neraca,
 - Laporan Arus Kas, dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*) (52)

- Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.
 - Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.
 - Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
 - penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya,
 - pembentukan cadangan tersembunyi,
 - sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau
 - sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Paragraph 53-Paragraph 56

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

(53)

- Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah
 - setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal
 - akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
- Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu:
 - (a) Materialitas;
 - (b) Pertimbangan biaya dan manfaat;
 - (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas (54)

- laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.
- Informasi dipandang material apabila
 - kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut
 - dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat (55)

- Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya.
 - laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya.
 - evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
 - Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
 - Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya
 - penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor
 - mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif (56)

- Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan
 - untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif
 - yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah.
- Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda,
 - terutama antara relevansi dan keandalan.
- Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Paragraph 57-Paragraph 77

Laporan Realisasi Anggaran (57)

- Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
 - ikhtisar sumber,
 - alokasi, dan
 - pemakaian sumber daya ekonomi
 - yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah,
 - yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran (58)

- Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari
 - pendapatan,
 - belanja,
 - transfer, dan
 - pembiayaan.
- Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - (a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - (b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - (c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran (58)

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- (d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (f) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (g) Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Neraca (59)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

- aset,
- kewajiban, dan
- ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- (c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Paragraph 78-Paragraph 89

Pengakuan (78)

- Pengakuan dalam akuntansi
 - adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
 - suatu kejadian atau peristiwa
 - dalam catatan akuntansi
 - sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan,
 - sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
- Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang
 - terhadap pos-pos laporan keuangan
 - yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait

Pengakuan (79)

- Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
 - (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
 - (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Pengakuan (80)

- Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan,
 - perlu dipertimbangkan aspek materialitas

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi (81)

- Dalam kriteria pengakuan pendapatan,
 - konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan
 - dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan.
 - Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah.
- Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan
 - atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran (82-83)

- Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya.
 - ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak.
 - Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,
 - maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi
 - apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi
 - setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

Pengakuan Aset (84)

- Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
 - dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal

Pengakuan Aset (85)

- Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari
 - pajak,
 - bea masuk,
 - cukai,
 - penerimaan bukan pajak,
 - retribusi,
 - pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan
 - setoran lain-lain, serta
 - penerimaan pembiayaan,
 - seperti hasil pinjaman.

Pengakuan Aset (85)

- Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi.
 - titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci,
 - termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
 - Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban (86-87)

- Kewajiban diakui
 - jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan
 - untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan
 - perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diakui
 - pada saat dana pinjaman diterima atau
 - pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan ⁽⁸⁸⁾

- Pendapatan menurut basis kas
 - diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
- Pendapatan menurut basis akrual
 - diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut

Pengakuan Belanja (89)

- Belanja menurut basis kas
 - diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran
 - pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Belanja menurut basis akrual diakui
 - pada saat timbulnya kewajiban atau
 - pada saat diperoleh manfaat.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Paragraph 90-Paragraph 91

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN (90)

- Pengukuran adalah
 - proses penetapan nilai uang
 - untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
- Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.
- Aset dicatat
 - sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau
 - sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN (91)

- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
- Transaksi yang menggunakan mata uang asing
 - dikonversi terlebih dahulu dan
 - dinyatakan dalam mata uang rupiah